

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Sistem Informasi Akuntansi

1. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Sistem adalah kumpulan elemen yang saling berkaitan dan bekerja sama dalam melakukan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Sujarweni (2015:1) Sistem adalah suatu rangkaian yang berfungsi menerima input (masukan), mengelola input, dan menghasilkan output (keluaran). Informasi akuntansi adalah hasil dari suatu proses akuntansi. Akuntansi adalah proses dari transaksi yang dibuktikan dengan faktur, lalu dari transaksi dibuat jurnal, buku besar, neraca lajur, kemudian akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak tertentu.

Menurut Mulyadi (2016:3) Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan yang terdiri dari jurnal, buku besar dan buku pembantu dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Menurut Hall (2007:10) dalam Rahman (2017:10) sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang memproses berbagai transaksi keuangan dan non keuangan yang secara langsung mempengaruhi pemrosesan transaksi keuangan. Menurut Bodnar dan Hopwood (2006: 3) dalam Rahman (2017:10) sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan, yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya kedalam informasi.

Menurut Marina, et al (2017:32) sistem informasi akuntansi merupakan jaringan dari seluruh prosedur, formilir-formulir, catatan-catatan dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data keuangan menjadi suatu bentuk laporan yang akan digunakan oleh pihak manajemen dalam mengendalikan kegiatan usahanya dan selanjutnya digunakan sebagai alat pengambilan keputusan manajemen.

Menurut Moscove, 2018 dalam Zamzani et al (2018:3) Sistem informasi akuntansi adalah komponen organisasi yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengolah, menganalisa dan mengkomunikasikan informasi finansial dan pengambilan keputusan

yang relevan kepada pihak di luar perusahaan (seperti kantor pajak, investor, kreditur, dan pemerintah) dengan pihak di dalam perusahaan (terutama manajemen dan karyawan). Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan sebuah sistem yang memproses data menjadi suatu informasi dengan cara mengumpulkan, mengolah dan menganalisa sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Fungsi utama sistem informasi akuntansi adalah memproses transaksi keuangan dan non keuangan yang berpengaruh langsung terhadap proses transaksi keuangan.

2.1.2 Tujuan atau Kegunaan Sistem Informasi Akuntansi

1. Tujuan Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Mardi (2011:4) Tujuan Sistem Informasi Akuntansi Dalam memenuhi kebutuhan informasi, baik untuk kebutuhan pihak eksternal maupun pihak internal, sistem informasi akuntansi harus didesain sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsinya. Demikian pula suatu sistem informasi akuntansi dalam memenuhi fungsinya harus mempunyai tujuan-tujuan yang dapat menghasilkan informasi-informasi yang berguna. Terutama dalam menunjang perencanaan dan pengendalian. Terdapat tiga tujuan sistem informasi akuntansi yaitu sebagai berikut:

- a. Guna memenuhi setiap kewajiban sesuai dengan otoritas yang diberikan kepada seseorang (*to fulfill obligations relating to stewardship*). Pengelolaan perusahaan selalu mengacu kepada tanggung jawab manajemen guna menata secara jelas segala sesuatu yang berkaitan dengan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Keberadaan sistem informasi membantu ketersediaan informasi yang dibutuhkan oleh pihak eksternal melalui laporan keuangan tradisional dan laporan keuangan yang diminta lainnya, demikian pula ketersediaan laporan internal yang dibutuhkan oleh seluruh jajaran dalam bentuk laporan pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan.
- b. Setiap informasi yang dihasilkan merupakan bahan yang berharga bagi pengambilan keputusan manajemen (*to support decision making by internal decision makers*). Sistem informasi menyediakan informasi guna mendukung

setiap keputusan yang diambil oleh pimpinan sesuai dengan pertanggungjawaban yang ditetapkan.

- c. Sistem informasi diperlukan untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan sehari-hari (*to support the day-to-day operations*).

Tujuan Dari Sistem Informasi Akuntansi menurut Mardika et al (2021:34):

- a. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi.
- b. Memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan terkait perencanaan dan pengendalian bisnis.
- c. Melakukan kontrol secara tepat terhadap aset perusahaan.
- d. Efisiensi biaya dan waktu terhadap kinerja keuangan.
- e. Penyajian data keuangan yang sistematis dan akurat dalam periode akuntansi yang tepat.

2. Karakteristik Sistem

Suatu sistem memiliki karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yang mencirikan bahwa hal tersebut dapat dikatakan sebagai suatu sistem. (Menurut Irawan, 2016:12 dalam Sari, 2019:14) suatu sistem karakteristik atau sifat-sifat tertentu sebagai berikut:

a. Komponen

Elemen-elemen yang lebih kecil yang disebut subsistem, misalkan sistem komputer terdiri dari subsistem perangkat keras, perangkat lunak dan manusia

b. Batasan Sistem

Merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya dengan sistem yang lainnya atau lingkungan luarnya.

c. Lingkungan Sistem

Lingkungan dari sistem adalah apapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem.

d. Penghubung Sistem

Merupakan media perantara antar subsistem. Melalui penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari suatu subsistem ke subsistem lainnya.

a. *Input* (Masukan)

Masukan adalah energy yang dimasukan ke dalam sistem. Masukan dapat berupa *maintenance input* dan sinyal *input*.

b. *Output* (Keluaran)

Keluar adalah hasil *energy* yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan.

c. Proses (Pengolahan Sistem)

Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah atau sistem itu sendiri sebagai pengolahannya. Pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran.

d. Sasaran dan Tujuan Sistem

Suatu sistem pasti mempunyai tujuan atau sasaran. Kalau suatu sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak akan ada gunanya.

3. Manfaat Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi

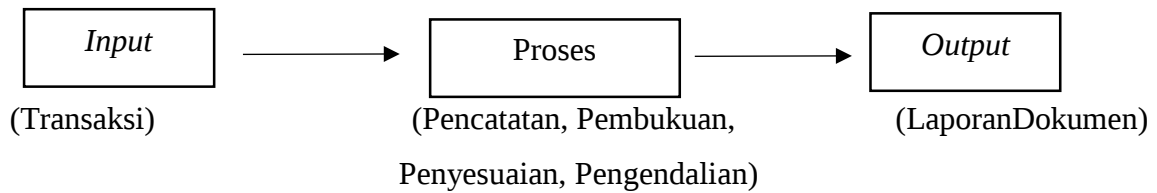
Menurut Romney & Steinbart (2018:11) sistem informasi akuntansi yang dirancang dengan baik dapat memberikan manfaat serta menambah nilai untuk organisasi dengan:

- a. Meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya dari produk atau layanan (jasa).
- b. Meningkatkan efisiensi.
- c. Berbagai pengetahuan.
- d. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokannya (*supply chains*).
- e. Memperbaiki struktur pengendalian internal.
- f. Meningkatkan kemampuan organisasi untuk pengambilan keputusan.

4. Subsistem Sistem Informasi Akuntansi

Dalam sistem informasi akuntansi (SIA) ada beberapa subsistem yang harus kita ketahui. Siklus transaksi sistem informasi akuntansi dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.1.2. Model Siklus Transaksi SIA



Sumber: Sistem Informasi Akuntansi (Krismiaji:2015)

Adapun penjelasan mengenai elemen model siklus tersebut adalah sebagai berikut :

- a. *Input* adalah data-data yang relevan untuk menghasilkan informasi yang di inginkan.
- b. *Proses* adalah langkah yang dilakukan untuk mengolah data menjadi informasi.
- c. *Output* adalah sistem informasi berupa informasi yang merupakan hasil dari pemrosesan.

5. Sistem Informasi Akuntansi Pemberian Kredit

Sistem informasi akuntansi Pemberian Kredit merupakan salah satu bagian dari sistem informasi dalam upaya pelayanan nasabah, adapun yang menjadi point penting pada sistem informasi akuntansi di PT. XXX XXXXX yaitu dengan adanya sistem Ms2 yang menganalisis semua penginputan data nasabah dan proses pinjaman samapai menunggu hasil .

Selanjutnya ada Flowchart

Sistem Informasi Akuntansi Pemberian Kredit di PT. XXX XXXXX dapat disajikan dengan sistem *Flowchart*. *Flowchart* digunakan untuk menggambarkan proses kegiatan dalam suatu organisasi.

6. *Flowchart*

a. Definisi *Flowchart*

Menurut Indrajani, 2015 dalam Tawir (2018:5) *Flowchart* merupakan gambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan prosedur suatu program. Bagan alir (*flowchart*) adalah bagan (*chart*) yang menunjukkan alir (*flow*) di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Bagan alir di gunakan terutama untuk alat

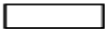
bantu komunikasi dan untuk dokumentasi. Menurut Jogiyanto HM, 2005 dalam Tawir (2018:5).

b. Jenis-jenis bagan alir (*Flowchart*) Menurut Jogiyanto (2005) dalam Tawir (2018:5) jenis-jenis bagan alir sebagai berikut:

- 1) Bagan Alir Sistem (*system flowchart*) merupakan bagan yang menunjukka arus pekerjaan secara keseluruhan dari sistem. 6 Bagan Alir Dokumen (*document flowchart*) disebut juga bagan alir formulir (*form flowchart*) merupakan bagan alir yang menunjukkan arus dari laporan dan formulir termasuk tembusan-tembusannya.
- 2) Bagan Alir Skematik (*schematic flowchart*) merupakan bagan alir yang menggambarkan prosedur di dalam sistem dengan menggunakan simbol-simbol bagan alir sistem dan gambar- gambar komputer serta peralatan lainnya yang digunakan oleh sistem.
- 3) Bagan Alir Program (*program flowchart*) merupakan bagan yang menjelaskan secara rinci langkah-langkah dari proses program.
- 4) Bagan Alir Proses (*process flowchart*) merupakan bagan alir yang banyak digunakan di teknik industri untuk menggambarkan proses dalam suatu prosedur.

Berikut adalah penjelasan atau arti dari gambar untuk membentuk *Flowchart*

7. Simbol–Simbol Flowchart

No	Nama	Simbol	Keterangan
1.	Dokumen		Dokumen atau laporan, dokumen tersebut dipersiapkan dengan tulisan tangan atau dicetak dengan komputer.
2.	Multidokumen		Digambarkan dengan cara penumpukan simbol dokumen.
3.	Pengetikan on-line		Masukan data melalui peralatan on-line seperti terminal atau personal computer.
4.	Proses		Fungsi pemrosesan yang dilaksanakan dengan computer, biasanya menghasilkan perubahan data atau informasi.
5.	Proses Manual		Pelaksanaan pemrosesan yang dilakukan secara manual.
6.	Disk Magnetik		Data disimpan permanen didalam disk magnetis, dipergunakan untuk file utama dan database
7.	Penyimpanan on-line		Data disimpan di dalam file on line temporer melalui media yang dapat diakses secara langsung seperti disk.
8.	Arus dokumen		Arah pemrosesan atau arus dokumen, arus yang normal berada dibawah dan mengarah ke kanan.
9.	On-page		Menghubungkan arus pemrosesan di satu halaman yang sama.
10.	Off-page connector		Suatu penanda masuk dari, atau keluar ke halaman lain
11.	Keputusan		Langkah pengambilan keputusan, dipergunakan dalam sebuah program computer bagan alir
12.	Titik terminal		Digunakan untuk menunjukkan awal dan akhir dari suatu proses
13.	Simpanan offline		File non computer yang diarsip menurut angka.

Gambar 2.1.2 Penjelasan gambar *flowchart*

Sumber: Menurut Jogiyanto HM (2005) dalam Tawir (2018:6)

8. Kegunaan Flowchart

Menurut M. Nur Nasution (2015) dalam Tawir (2018:9) *Flowchart* dapat digunakan untuk berbagai maksud, misalnya sebagai berikut:

- a. Memberikan pengertian tentang jalannya proses. Banyak orang lebih cepat mengerti informasi yang disampaikan melalui grafik atau bagan daripada yang disampaikan melalui uraian verbal. *Flowchart* dapat menunjukkan hubungan antara langkah-langkah dalam proses. Untuk menunjukkan langkah-langkah yang sebenarnya terjadi dalam proses, maka *flowchart* seharusnya dibuat oleh orang-orang yang bekerja di dalam sistem.
- b. Membandingkan proses ideal dengan proses yang sebenarnya terjadi. Dengan menggunakan *flowchart* kita dapat membandingkan:
 - 1) Proses yang seharusnya berjalan menurut peraturan atau *standing operating procedur* (SOP)
 - 2) Proses yang sesungguhnya berlangsung
 - 3) Proses yang kita harapkan berjalan menurut ide kita.
- c. Mengetahui langkah-langkah duplikatif dan langkah-langkah yang tidak perlu. Langkah-langkah *duplikatif* dan langkah-langkah yang tidak perlu mempunyai efek kurang menguntungkan karena akan membawa konsekuensi menambah orang yang bekerja dalam proses, menambah waktu proses, dan akhirnya dapat menambah biaya proses.
- d. Mengetahui dimana pengukuran dapat dilakukan. Setelah diketahui persoalan yang timbul dalam flowchart, maka akan diperoleh landasan dimana perbaikan dapat dilakukan di dalam proses. Selanjutnya, kita juga akan mengetahui dimana pengukuran harus dilakukan dan dengan cara apa pengukuran itu harus dilakukan.
- e. Menggambarkan sistem total. Sistem total meliputi input material dan jasa dari pemasok, seluruh proses internal dan penerimaan produk serta jasa, termasuk umpan balik yang diberikannya. Apabila kita dapat menghubungkan tuntutan pelanggan dengan langkah-langkah tertentu dalam proses yang mempunyai peranan untuk memenuhi tuntutan pelanggan tersebut, maka kegiatan ini disebut *quality function development*. Hanya dengan meneliti sistem total, kita

dapat mengetahui bagaimana sistem produksi bekerja dan menganalisisnya untuk melakukan perbaikan proses.

2.1.3 Pemberian Kredit

1. Kredit

Menurut Muljono 2007, Dalam Permatasari (2019:13) Kata kredit berasal dari bahasa romawi “Credare” yang berarti kepercayaan atau dalam bahasa latin “Creditum” yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Pengertian kredit secara yuridis diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar perusahaan dengan pihak lain”.

Kesimpulannya adalah bahwa kredit adalah pemberian sejumlah pinjaman yang dapat dikembalikan dengan berupa angsuran kepada debitur dan mengharuskan debitur untuk mengembalikan sesuai jumlah yang dipinjam dan dilunasi salam waktu yang sudah ditentukan dan disepakati awalnya. Debitur harus mengembalikan jumlah yang dipinjam ditambah bunga atas pinjaman tersebut.

2. Unsur-unsur Kredit

Unsur-unsur kredit adalah keterkaitan komponen yang ada dalam pemberian kredit. Unsur-unsur yang terdapat dalam kredit menurut Kasmir (2014:87) adalah:

a. Kepercayaan

Keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang.

b. Kesepakatan

Bentuk suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

c. Jangka Waktu

Masa pengembalian kredit yang telah disepakati keduanya. Jangka waktu dapat berbentuk jangka pendek, menengah atau jangka panjang.

d. Risiko

Tingkat risiko yang dihadapi dari pemberian kredit yang diberikan oleh pemberi kredit kepada penerima kredit.

e. Balas Jasa

Keuntungan yang diharapkan atas kredit yang dipinjamkan, keuntungan yang dimaksud berupa bunga yang diterima oleh pihak perusahaan.

3. Tujuan dan Fungsi Kredit

Tujuan utama dalam pemberian kredit menurut (Rivai 2013:99) :

A. *Profitability*

Menghasilkan keuntungan yang diraih dari bunga yang harus dibayar oleh debitur, sehingga perusahaan hanya akan menyalurkan kredit kepada usaha yang diyakini mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Unsur keamanan (*safety*) dan unsur keuntungan (*profitability*) suatu kredit saling keterkaitan. Keuntungan merupakan tujuan dari pemberian kredit yang terjelma dalam bentuk bunga yang diterima.

B. *Safety*

Keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin, sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Keamanan yang dimaksud agar prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang atau jasa pasti terjamin agar keuntungan (*profitability*) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan. Kredit mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Menurut Rivai (2013:200) Fungsi kredit di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal/uang.

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, deposito ataupun tabungan. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Dengan demikian dana yang mengendap di bank tidaklah *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat untuk menghasilkan barang atau jasa oleh pihak penerima kredit.

2) Meningkatkan *utility* (daya guna) dari suatu barang.

Produsen dengan bantuan kredit tanpa memproduksi bahan mentah menjadi barang jadi sehingga utilitas bahan tersebut meningkat. Selain itu dengan bantuan kredit dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaanya kurang ke tempat yang bermanfaat.

3) Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Kredit yang disalurkan lewat rekening Koran perusahaan atau pribadi menciptakan pertambahan uang giral. Melalui kredit, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang sebab kredit menciptakan kegairahan berusaha sehingga pengguna uang akan bertambah baik secara kualitatif dan kuantitatif.

4) Menimbulkan gairah berusaha masyarakat.

Setiap manusia akan selalu melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan ekonomi atau usaha akan selalu meningkat, akan tetapi tidak selalu diimbangi dengan peningkatan laba atau dana. Karena itu perusahaan akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya.

5) Alat stabilisasi ekonomi.

Stabilitas ekonomi diarahkan pada usaha-usaha seperti pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitasi prasarana dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Kredit bank dibutuhkan untuk menekan arus inflasi dan usaha pembangunan ekonomi dengan cara tabungan masyarakat ditingkatkan melalui pengeluaran surat berharga seperti deposito, sertifikat-sertifikat bank dan uang tersebut disalurkan kepada usaha-usaha yang produktif.

6) Jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional.

Para pengusaha yang memperoleh kredit akan berusaha meningkatkan usahanya sehingga peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Apabila rata-rata pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal dan karyawan mengalami peningkatan pendapatan maka pendapatan Negara bertambah sehingga secara langsung melalui kredit pendapatan nasional bertambah.

7) Meningkatkan hubungan ekonomi internasional.

Bank sebagai lembaga keuangan tidak saja bergerak dalam negeri tapi juga diluar negeri. Negara-negara yang kuat ekonominya banyak memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang dalam bentuk bantuan kredit. Melalui bantuan kredit antar negara maka lalu lintas pembayaran internasional dapat terarah dan hubungan perekonomian serta perdagangan dapat berjalan dengan lancar.

4. Pengertian Kredit Umum dan Kredit Multiguna

Menurut Sa'adah (2015:2) Kredit Umum adalah kredit yang biasanya digunakan untuk modal kerja atau modal tambahan, sedangkan kredit multiguna adalah kredit yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), pegawai atau calon pegawai di perusahaan daerah maupun negeri, anggota polisi, anggota legislatif, karyawan perusahaan swasta, pensiunan dan purnawirawan.

5. Jenis-jenis Kredit

Kredit pada prinsipnya satu jenis saja yaitu uang bank yang dipinjamkan kepada calon nasabah dan yang akan dikembalikan pada suatu waktu tertentu dimasa mendatang. Tetapi berdasarkan keperluan usaha yang berbeda serta berbagai unsur ekonomi yang mempengaruhi bidang usaha para nasabah maka jenis kredit menjadi beragam.

Menurut Kasmir (2014:90) secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dilihat dari berbagai segi yaitu:

1. Dilihat dari segi kegunaan

a. Kredit investasi

Kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan pelunasan usaha, membangun proyek atau untuk keperluan rehabilitasi. Contoh kredit investasi misalnya membangun pabrik atau membeli mesin-mesin.

b. Kredit modal kerja

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contoh kredit modal kerja untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya yang berkaitan dengan produksi perusahaan.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

a. Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha, produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Contohnya untuk membangun pabrik yang nantinya menghasilkan barang dan jasa.

b. Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Contohnya kredit untuk perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabotan rumah tangga.

c. Kredit perdagangan

Kredit biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh kredit ini misalnya kredit ekspor dan impor.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

a. Kredit jangka pendek

Kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun atau paling lama 1 (satu) tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya peternakan ayam atau tanaman padi dan palawija

b. Kredit jangka menengah

Kredit dengan jangka waktu berkisar antara 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun, biasanya untuk investasi. Contohnya seperti jeruk atau peternakan kambing.

c. Kredit jangka panjang

Kredit yang masa pengembaliannya di atas 3 (tiga) tahun atau 5 (lima) tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti kebun karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

4. Dilihat dari segi jaminan

a. Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud, tidak berwujud atau jaminan orang.

b. Kredit tanpa jaminan

Kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama ini.

5. Dilihat dari segi sektor usaha

- a. Kredit pertanian, yaitu kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
- b. Kredit peternakan, dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang kambing atau sapi.
- c. Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar.
- d. Kredit pertambangan, jenis usaha tambang yang pembiayaannya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.
- e. Kredit pendidikan, yaitu kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa/i.
- f. Kredit profesi, yaitu kredit yang diberikan kepada para profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.
- g. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.
- h. Dan sektor-sektor lainnya.

6. Dasar Hukum Kredit

Munif Fuady (1996:9) dalam Sari (2017:14) Dasar hukum adalah norma hukum yang menjadi landasan bagi setiap tindakan hukum oleh subyek hukum baik orang perorangan ataupun yang berbentuk badan hukum. Dasar hukum dalam perjanjian kredit bank adalah sebagai berikut:

a. Perjanjian diantara para pihak

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Maka dengan ketentuan pasal itu berlaku sah setiap perjanjian yang dibuat secara sah bahkan kekuatannya sama dengan kekuatan undang-undang. Demikian pula dalam bidang perkreditan, khususnya kredit bank yang diawali oleh suatu perjanjian yang sering disebut dengan perjanjian kredit dan umumnya dilakukan dalam bentuk tertulis.

Disini dapat dijelaskan bahwa perjanjian diantara dua pihak adalah ketentuan atau peraturan sendiri yang dibuat oleh pihak tersebut berdasarkan kesepakatan. Perjanjian ini umumnya dalam bentuk tertulis. Dalam bidang perkreditan, perjanjian ini dilakukan oleh bank dan nasabah (calon debitur).

b. Undang-undang sebagai dasar hukum

Di Indonesia undang-undang yang khusus mengatur tentang perbankan adalah Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Disini dengan jelas tercantum Undang-Undang yang mengatur tentang perbankan yang didalamnya mencakup segala aktivitas bank yang berarti memiliki kekuatan hukum.

c. Peraturan terkait lainnya sebagai dasar hukum

Dalam pemberian kredit bank sering kali terkait dengan beberapa peraturan perundang-undangan, sebagai contoh karena kredit pada hakikatnya merupakan suatu wujud perjanjian, maka akan terkait buku ketiga KUH Perdata tentang Perikatan. Disini dapat dijelaskan bahwa dasar hukum perbankan tidak hanya terikat mengenai Undang-Undang No.10 Tahun 1998 dan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 saja.

Dasar hukum perbankan ini dapat dikaitkan dengan Undang-Undang yang lain namun tetap saling berkaitan. Dalam Undang-Undang Perbankan tidak dicantumkan secara tegas apa dasar hukum perjanjian kredit. Namun demikian dari pengertian kredit, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum perjanjian kredit adalah pinjam meminjam yang didasarkan kepada kesepakatan antara bank dengan nasabah. 16 Masalah pinjam meminjam sendiri diatur dalam buku III Bab ke tiga belas KUH Perdata.

Menurut Sembiring (2000:67) dalam Sari (2017:16) Dalam pasal 1754 KUH Perdata disebutkan, bahwa pinjam meminjam ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Selanjutnya dalam Pasal 1765 KUH Perdata disebutkan, bahwa diperbolehkan menjanjikan bunga atas peminjaman uang atau barang lain yang menghabiskan karena pemakaian.

7. Sistem Pemberian Kredit

Menurut Sinurat (2008:24) Perusahaan pemberi kredit dalam pelaksanaan pemberian kredit kepada nasabah dihadapkan pada suatu masalah yang kompleks. Perkreditan mempunyai sifat yang kasuasistis artinya masing-masing calon debitur mempunyai permasalahan spesifik berbeda secara materil antar satu nasabah dengan nasabah yang lain. Oleh karena itu diperlukan pendekatan dan penanganan secara berbeda dan memperhatikan ciri-ciri khusus dari usaha.

Prosedur dalam pemberian kredit dibagi atas beberapa tahap yaitu:

1. Tahap Perencanaan dan Persiapan

Tahap perencanaan bagi perusahaan adalah hal yang mutlak yang harus dilakukan karena merupakan suatu peraturan demi mencapai tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan tidak hanya profit saja tetapi juga menjaga keamanan keuangan nasabah. Aspek-aspek penting yang harus dipertimbangkan penyusunan suatu rencana kredit yaitu kondisi perekonomian dan perdagangan, jenis sektor ekonomi, keadaan nasabah keadaan keuangan perusahaan, organisasi perusahaan dan kemampuan pejabat kredit

2. Tahap Analisis Kredit

Tahap ini merupakan persiapan keputusan kredit, pengumpulan data, penilaian data dan pemeriksaan langsung dilapangan untuk meninjau apakah keadaan dilapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Analisis kredit bertujuan utama untuk mengevaluasi kemampuan dan kesediaan calon debitur membayar kembali kredit sesuai dengan isi perjanjian kredit. Seorang kreditur menilai resiko kredit harus mempertimbangkan berbagai faktor.

3. Tahap Keputusan Pelaksanaan Kredit

Setiap tahap pemberian kredit harus dibuat suatu perjanjian tertulis antara bank dan si penerima kredit. Isi perjanjian kredit mencantumkan segala hak dan kewajiban kedua belah pihak. Hal-hal yang tertera dalam perjanjian kredit adalah:

a. Maksimum Kredit

Jumlah yang tertera dalam maksimum kredit (*line of Credit*) adalah jumlah yang tertinggi yang diizinkan kepada si penerima kredit. Jumlah ini berdasarkan perhitungan kalkulasi kredit dalam aspek finansial.

b. Jangka waktu

Sesuai dengan persetujuan antara pihak bank dan debitur maka ada kredit yang jangka waktu pendek, menengah dan panjang.

c. Keperluan kredit

Isi perjanjian kredit dicantumkan tujuan keperluan kredit sesuai dengan bidang usaha debitur berdasarkan target produktivitas yang akan dicapainya.

d. Bunga (propisi)

Propisi kredit adalah suatu beban yang dikenakan kepada debitur sebagai akibat dari perjanjian kredit yang dibuat. Propisi harus dibayar secara kontan oleh debitur pada saat perjanjian ditandatangani dan apabila kredit itu diperpanjang jangka waktunya, maka propisi kredit ditetapkan 1 % dari jumlah maksimum kredit.

e. Bea materai

Sesuai dengan aturan bea materai maka setiap pemberian kredit dikenakan bea sebesar $\frac{1}{2}$ % (setengah per seratus) dari maksimum kredit yang diberikan. Jumlah tersebut kemudian disetorkan ke kas negara.

f. Bentuk kredit

Berdasarkan perjanjian antara pihak bank dan debitur, maka dapat memilih kredit rekening koran bebas, rekening koran terbatas atau aflopend rekening koran.

g. Cara penarikan dan cara pelunasan

Penarikan dan pelunasan ditetapkan dalam suatu jadwal tertentu berdasarkan persetujuan bersama.

h. Jaminan kredit

Isi perjanjian kredit harus dikemukakan secara terperinci mengenai jaminan kredit, baik jumlah jaminan, nilai jaminan dan status kepemilikannya. Nilai jaminan harus sesuai dengan penetapan transaksi bank.

i. Asuransi

Setiap jaminan diasuransikan sesuai dengan sifat jaminan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mengamankan resiko bilaman terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

j. Ketentuan-ketentuan tambahan

Bank dapat menetapkan ketentuan-ketentuan tambahan diluar ketentuan pokok dan ketentuan tersebut dicantumkan dalam pasal tambahan dalam perjanjian kredit.

8. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2014:94) Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian dengan benar. Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaian lainnya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank.

Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar benar menguntungkan dilakukan dengan analisis “5 C” dan “7 P”

Adapun penjelasan untuk analisis dengan prinsip 5 C kredit yaitu:

1. *Character* (watak)

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hoby dan sosial; standingnya. Ini semua merupakan ukuran “kemauan” membayar.

2. *Capacity* (kemampuan)

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3. *Capital* (modal)

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas*,

solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

4. *Collateral* (jaminan)

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. *Condition* (kondisi)

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Kemudian penilaian kredit dengan metode analisis 7 P yaitu:

1. *Personality*

Menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2. *Party*

Mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapat fasilitas yang berbeda dari bank.

3. *Purpose*

Untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Sebagai contoh untuk modal kerja atau investasi, konsumtif, produktif dan lain sebagainya.

4. *Prospect*

Untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak, dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.

5. *Payment*

Ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber apa saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, akan semakin baik. Dengan demikian, jika salah satu usahanya merugikan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam memperoleh laba. Tingkat *profitabilitas* diukur dari periode ke periode lain, apakah akan tetap sama atau semakin meningkat, dan jika akan diberikan kredit maka profitabilitas usaha debitur akan menjadi lebih menguntungkan atau tidak.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang, orang atau jaminan asuransi.

9. **Prosedur Pemberian Kredit**

Menurut Kasmir (2014:100) Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif.

Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum yaitu sebagai berikut:

1. Pengajuan berkas-berkas

Pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal, kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan.

2. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuan untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar.

3. Wawancara I

Penyidikan kepada calon peminjam berhadapan langsung dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang

bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.

4. *On the spot*

Pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara I.

5. Wawancara II

Perbaiki berkas, apabila ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara I dicocokkan dengan pada saat *on the spot* apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

6. Keputusan kredit

Menentukan kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit yang akan mencakup:

- a) Jumlah uang yang diterima
- b) Jangka waktu kredit
- c) Biaya-biaya yang harus dibayar.

7. Penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya

Kredit sebelum dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan:

- a) Antara bank dengan debitur secara langsung atau
- b) Dengan melalui notaris

8. Realisasi kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

9. Penyaluran atau penarikan dana

Pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari penyaluran kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu sekaligus atau bertahap

Menurut Sutojo (2000:224) dalam Sinurat (2008:21) Prosedur Pemberian dan Pengawasan Kredit. Pedoman prosedur pemberian dan pengawasan kredit terdiri dari :

a. Standar dokumentasi kredit

Dokumen-dokumen merupakan bahan masukan yang penting bagi pihak bank untuk memonitor perkembangan mutu kredit yang telah diberikan kepada debitur. Dokumen kredit standar yang diperlukan dalam transaksi kredit antara lain data calon debitur, perizinan usaha (SIUP, NPWP, TDP), laporan keuangan perusahaan tiga periode terakhir, aktivitas rekening minimal 6 (enam) bulan terakhir, tujuan penggunaan kredit, informasi antar bank, laporan *On The Spot* perusahaan dalam pengolahan lingkungan hidup.

b. Perlindungan Asuransi

Resiko yang ditanggung debitur digolongkan menjadi dua yaitu resiko dinamis dan resiko statis (resiko murni). Resiko dinamis muncul karena rencana kerja atau startegi usaha yang disusun debitur tidak berhasil seperti yang diharapkan, contoh harga jual produk tidak kompetitif sehingga penjualan menurun yang mengakibatkan perusahaan rugi sehingga tidak mampu membayar bunga atau kredit seperti dijadwalkan. Resiko statis muncul karena adanya musibah yang dialami debitur seperti kebakaran atau bencana alam. Bank dalam kebijakan kredit, wajib menyatakan dengan jelas jenis asuransi apa saja yang harus ditanggung para debitur untuk memperkecil resiko menurunnya kemampuan pengembalian kredit.

c. Pengawasan Kredit

Bank melakukan pengawasan dengan cara mengawasi pemberian kredit apakah telah dilaksanakan sesuai ketentuan intern bank dan perbankan yang berlaku, memantau perkembangan kegiatan debitur, membina debitur untuk memenuhi kewajibannya kepada bank, mengawasi penilaian kolektibilitas kredit dan memantau kecukupan jumlah Penyisihan Penghapusan aktiva Produktif (PPAP).

10. Faktor-faktor Penghambat Prosedur Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2014:109) Sepandai apapun analisis kredit dalam menganalisis setiap permohonan kredit, kemungkinan kredit tersebut macet pasti ada, hal ini disebabkan oleh dua unsur sebagai berikut:

1. Dari pihak perbankan

Pihak analisis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya. Kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur dapat terjadi, sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subyektif.

2. Dari pihak nasabah

Kemacetan kredit dapat dilakukan akibat dua hal yaitu:

a) Adanya unsur kesenjangan

Nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet, dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar.

b) Adanya unsur tidak sengaja

Debitur ingin membayar, tetapi tidak mampu. Pihak bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian, dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar.

Menurut Bratanovic (2011:156) Faktor penghambat prosedur pemberian kredit adalah sebagai berikut:

a. *Self Dealing*

Pemberian kredit yang berlebihan kepada pihak tertentu dengan menyetujui prinsip pemberian kredit yang sehat dibawah tekanan

b. Persetujuan Prinsip Kredit

Kredit yang diperpanjang dengan persyaratan yang tidak memadai dan pelanggaran terhadap prinsip pemberian kredit yang sehat.

c. Kecemasan atas Pendapatan

Takut akan laba yang diperoleh dari pemberian kredit, karena kredit merupakan salah satu sumber pendapatan sehingga mengabaikan risiko yang ada.

d. Informasi Kredit yang Tidak Lengkap

Kredit diperpanjang tanpa penilaian kelayakan debitur yang layak.

e. Kepuasan dengan Diri Sendiri

Kepuasan dengan diri sendiri menyebabkan keputusan pemberian kredit yang buruk. Kepuasan terhadap diri sendiri biasanya diwujudkan dalam kurangnya pengawasan yang memadai terhadap debitur lama dan sudah menjadi familiar.

f. Kurangnya Pengawasan

Pengawasan yang tidak efektif selalu menghasilkan kurangnya pengetahuan tentang masalah debitur selama masa pinjaman, akibatnya pinjaman yang semula berkembang sehat menjadi masalah dan mengakibatkan kerugian karena kurangnya pengawasan.

g. Ketidakmampuan Teknis

Pegawai kredit yang kurang pengetahuan dalam menganalisis dan mengevaluasi laporan keuangan. Lemahnya Seleksi Risiko Hal-hal yang mengarah kepada lemahnya seleksi risiko yaitu:

1. Perpanjangan kredit yang melampaui kapasitas pembayaran wajar dari debitur yang disebabkan kondisi ekonomi dan bunga yang tidak stabil.
2. Pinjaman yang nilainya relatif dengan investasi ekuitas pemilik.
3. Kredit yang bukan berdasarkan kelayakan debitur.
4. Pinjaman kepada perusahaan yang beroperasi di daerah terpencil.
5. Pinjaman yang berdasarkan deposito, bukan berdasarkan kekayaan bersih atau jaminan yang wajar.
6. Kredit yang berdasarkan nilai jaminan bermasalah.

Faktor-faktor yang disebutkan di atas baik faktor internal atau eksternal. Faktor yang sering menghambat dalam prosedur pemberian kredit yaitu adanya *self dealing*, kurangnya keterampilan atau pengetahuan dari pegawai mengenai prosedur pemberian kredit, dan adanya sikap ceroboh atau puas diri terhadap diri sendiri.

Self dealing terjadi karena faktor kedekatan, sehingga dalam prosedur pemberian kredit harus ditumbuhkan sikap profesional supaya proses pemberian kredit berjalan dengan semestinya. Keterampilan yang kurang atau pengetahuan pegawai dalam mengelola kredit merupakan penghambat yang sangat mengganggu dalam prosedur pemberian kredit. Pegawai yang mengelola kredit merupakan

penentu masa depan dari kredit yang diberikan dan penentu berlangsungnya usaha kegiatan perkreditan, maka pelatihan kepada pegawai yang mengelola kredit harus diperhatikan.

Sikap ceroboh oleh pegawai pengelola kredit juga menjadi penghambat yaitu memandang sebelah mata terhadap risiko kredit yang ada, maka harus ada evaluasi terhadap berlangsungnya proses pemberian kredit secara berkala untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang ada.

2.1.4 Risiko Kredit

Pengertian Risiko Kredit

Menurut Fahmi, (2012:358) dalam Sahriani (2015:32) Dalam menjalankan usaha didalamnya pasti terdapat risiko, terutama perbankan dalam melakukan pemberian kredit yaitu risiko kredit, risiko kredit tersebut mempunyai dampak pada kelancaran dan kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan atau profitabilitasnya. Sehingga kondisi demikian juga menyebabkan bank tersebut mengalami kerugian, karena yang seharusnya laba mengalami peningkatan, maka kondisi ini akan menyebabkan kerugian pada bank. Dalam kegiatan mobilisasi dan penanaman dana sangat ditentukan dapat tidaknya bank mengelola berbagai risiko yang berkaitan dengan usaha bank.

Risiko dapat diartikan sebagai bentuk ketidak pastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nanti dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini. Jadi manajemen risiko merupakan pendekatan yang terstruktur dalam upaya mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelola risiko dengan menggunakan pengelolaan sumber daya. Menurut Silvanita (2009: 28) dalam Sahriani (2015:32) Risiko kredit adalah risiko pinjaman tidak kembali sesuai dengan kontrak, seperti penundaan, pengurangan pembayaran suku bunga atau pinjaman pokoknya atau tidak membayar pinjaman sama sekali. Risiko kredit muncul karena adanya pilihan merugikan dan bahaya moral dari pinjaman. Peminjam dengan risiko tinggilah yang paling mau meminjam karena mengharapkan pengembalian yang tinggi, dan untuk mendapatkannya mereka melakukan pilihan merugikan. Sebagaimana pengertian kredit yang didefinisikan secara sederhana.

Risiko kredit adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan memenuhi kewajibannya. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti perkreditan, penyediaan dana, investasi dan pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam banking book maupun trading book.

Menurut Rivai *et al* (2007:806) dalam Sahriani (2015:33) Risiko kredit adalah risiko akibat dari kredit yang tidak tertagih dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian. Jadi risiko kredit merupakan akibat dari adanya pemberian kredit kepada nasabah yang tidak mampu membayar dengan jangka waktu yang ditentukan pihak bank.

Menurut Djojosoedarso (2007:2) istilah risiko sudah biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari, yang umumnya sudah dipahami. Tetapi pengertian secara ilmiah dari risiko sampai saat ini masih tetap beragam, yaitu antara lain:

1. Risiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu.
2. Risiko adalah ketidakpastian (*Uncertainty*) yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian.
3. Risiko adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa.
4. Risiko adalah merupakan penyebaran dan penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan.
5. Risiko adalah probabilitas sesuatu hasil yang berbeda dengan yang diharapkan.

Tipe Risiko

Menurut Erlangga (2018:12) Tipe risiko Dari sudut pandang akademisi ada banyak jenis risiko namun secara umum risiko itu hanya dikenal dalam 2 tipe saja, yaitu risiko murni dan risiko spekulatif.

1. Risiko murni, Risiko murni dikelompokkan pada 3 tipe resiko yaitu:
 - a. Risiko asset fisik. Merupakan risiko yang berakibat timbulnya kerugian paada asset fisik suatu perusahaan atau organisasi.
 - b. Risiko karyawan. Merupakan risiko karena apa yang dialami oleh karyawan yang bekerja di perusahaan atau organisasi tersebut.
 - c. Risiko legal. Merupakan risiko dalam bidang kontrak yang mengecewakan atau kontrak tidak berjalan sesuai dengan rencana.

2. Risiko spekulatif, resiko spekulatif ini dapat dikelompokkan kepada empat tipe risiko yaitu:
 - a. Risiko pasar. Merupakan risiko yang terjadi dari pergerakan harga di pasar.
 - b. Risiko kredit. Merupakan risiko yang terjadi karena counter party gagal memenuhi kewajibannya kepada perusahaan.
 - c. Risiko likuiditas. Merupakan risiko karena ketidakmampuan memenuhi kebutuhan kas. Contohnya bank tidak mampu memenuhi penarikan kredit oleh nasabah karena dana tidak mencukupi.
 - d. Risiko operasional. Merupakan risiko yang disebabkan pada kegiatan operasional yang tidak berjalan dengan lancar. Ada beberapa jenis risiko operasional:
 - a. *Manual Risk*, hal yang dapat terjadi seperti dalam mengumpulkan berkas pemberian kredit secara manual yang ditulis menggunakan kertas membuatnya terancam saat kantor Anda kebakaran, atau ada kesalahan dalam pelatakkannya sehingga tidak dapat atau hampir tidak mungkin untuk diganti.
 - b. *Computer Risk*, teknologi memang sudah makin canggih, fakta tersebut tidak menutupi kemungkinan akan terjadinya *error*. Dari apabila ada perubahan dalam program yang bisnis yang dipakai, kualitas IT yang kurang mahir, pergantian perangkat komputer saat diperlukan, dan apabila perangkat-perangkat bisnis Anda diserang oleh virus.
 - c. Kecelakaan Kerja, tentu hal ini adalah hal yang harus diperhatikan karena sangat mungkin terjadi. Jika tidak mempunyai sistem manajemen kerja yang baik untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan juga dapat menjadi sorotan dari pers – membuat nama perusahaan mempunyai reputasi yang negatif.

Manajemen Risiko

Manajemen risiko dapat di ikhtisarkan sebagai berikut:

1. Melakukan Identifikasi Risiko. Identifikasi risiko bertujuan menemukan secara sistematis risiko (kerugian potensial) yang mungkin dihadapi usaha. Dalam hal ini apabila risiko tidak teridentifikasi, maka berarti usaha tersebut menanggung risiko secara tidak sadar.

2. Melakukan Pengukuran/Analisis Risiko Tujuan pengukuran/analisis terhadap risiko adalah untuk menentukan relatif yang dihadapi. Pengukuran risiko dilakukan dengan melihat frekuensi atau jumlah dan tingkat kerugian yang akan terjadi.
3. Melakukan Penanganan Risiko. Setelah diketahui dan dilakukan pengukuran risiko pengusaha memutuskan bagaimana menangani risiko. Beberapa metode yang dapat digunakan dalam menangani risiko adalah:
 - a. Menghindari risiko
 - b. Mencegah dan mengendalikan risiko.
 - c. Menahan risiko
 - d. Memindahkan risiko.
4. Pemantauan Dalam penyusunan permohonan kredit, bahasan mengenai aspek risiko bertujuan untuk menjelaskan mengenai layak tidaknya usaha tersebut dibiayai apabila terjadi perubahan-perubahan pada unsur-unsur kelayakan pemasaran, teknologi dan produksi serta keuangan. Kajian terhadap aspek risiko ini terutama untuk menyajikan dan menganalisis: pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya risiko kegagalan usaha yang mungkin akan dihadapi pengusaha. Kedua, aspek risiko dalam suatu analisis kelayakan usaha apabila dikemudian hari ternyata usaha ini akan diusulkan dan dibiayai oleh Bank. Ketiga, perumusan langkah-langkah yang perlu diantisipasi untuk bisa keluar dari risiko kegagalan usaha.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pemberian kredit dan risiko kredit telah banyak dilakukan. Namun, penelitian tersebut memiliki variasi yang berbeda seperti penggunaan variabel independen, lokasi penelitian, tahun penelitian, jumlah responden yang berbeda dan lain sebagainya. Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pemberian kredit dan risiko kredit dapat disajikan dibawah ini:

Rahman (2017) melakukan penelitian tentang Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Komponen Utama Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Perusahaan Pada PT Tiki Palembang. Dari pembahasan dan uraian bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, dan Komponen Utama Sistem informasi akuntansi terhadap kinerja perusahaan bahwa: Sistem Informasi

Akuntansi, dan komponen utama sistem informasi akuntansi signifikan memengaruhi kinerja perusahaan secara simultan. Sistem Informasi Akuntansi signifikan memengaruhi kinerja perusahaan secara parsial. Komponen Utama Sistem Informasi Akuntansi signifikan memengaruhi kinerja perusahaan secara parsial.

Permatasari (2019) melakukan penelitian tentang Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pada PT BPR Bank Jatim Kabupaten Ponorogo Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan pengkajian teori yang diperoleh, dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Prosedur pemberian kredit di PT. BPR Bank Jatim Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan ketentuan prosedur yang dimiliki, walaupun dalam praktiknya masih terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan.
2. Hambatan-hambatan dalam prosedur pemberian kredit di PT. BPR Bank Jatim meliputi adanya faktor kedekatan calon nasabah dengan pegawai bank, persyaratan dalam pengajuan permohonan kredit yang tidak dilengkapi, dan informasi palsu yang diberikan oleh calon nasabah.
3. Cara mengatasi hambatan-hambatan di PT. BPR Bank Jatim adalah melakukan survei kembali atau survei lebih mendalam mengenai calon nasabah yang dekat dengan pegawai, untuk persyaratan yang tidak lengkap dalam permohonan kredit maka cara mengatasinya adalah penundaan permohonan kredit dari *Customer Service* (CS) sampai dengan persyaratan lengkap dan informasi palsu yang diberikan oleh nasabah cara mengatasinya yaitu melakukan kunjungan dengan tujuan informasi yang diberikan benar.

Sari (2017) Berdasarkan hasil uraian dan pembahasan yang telah penulis kemukakan dalam penelitian ini maka kesimpulan yang dapat diambil dari tugas akhir ini yaitu prosedur pemberian kredit usaha mikro pada PT. BPR Eka Bumi Artha memiliki 8 tahapan yaitu: tahap permohonan kredit, investigasi, *on the spot*, analisa kredit, pengajuan kepada komite kredit, pemberian keputusan kredit/pencairan kredit, tahap monitoring, dan tahapan terakhir adalah tahap pelunasan. Dalam penyaluran kredit usaha mikro PT. BPR Eka Bumi Artha menggunakan analisis 5C yaitu: *character* (watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *colleteral* (jaminan), dan *condition of economy* (kondisi ekonomi).

Latega (2018) Berdasarkan hasil uraian dan pembahasan yang telah penulis kemukakan dalam penelitian ini maka kesimpulan yang dapat diambil dari tugas akhir ini yaitu 1. PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang ahmad yani Makassar di dalam menyalurkan kredit senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku terutama *system* dan prosedur serta prinsip – prinsip pemberian Kredit. 2. Berdasarkan hasil analisis maka hipotesis yang dikemukakan terbukti karena manajemen resiko berpengaruh terhadap penyaluran kredit usaha kecil (KUK) pada PT.Bank Rakyat Indonesia(Persero),Tbk Cabang ahmad yani makassar, berdasarkan tingkat NPL yang rendah (resiko rendah) karena dibawah 5%. 3. PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang ahmad yani Makassar sesuai dengan penyaluran kredit baik jumlah kredit maupun persentase juga mengalami peningkatan, karena fungsi utama bank tersebut menerima tabungan disamping menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan

Paulus (2016) Sistem informasi akuntansi yang diterapkan Rumah Sakit Siloam Manado sudah berjalan sesuai standart operasional dan berfungsi atas pengendalian internal pendapatan. Bukti-bukti system informasi akuntansi yang memadai yaitu:

- a. Sumber daya manusianya terdiri dari orang-orang yang kompeten dan berpengalaman serta menjalankan tugasnya dengan baik.
- b. Software yang digunakan untuk memproses data sangat mendukung kegiatan yang dijalankan dalam hal menginput dan mengolah data pasien yang berobat.
- c. Dokumen yang digunakan sebagai alat untuk menghasilkan informasi pendapatan.
- d. Prosedur penerimaan pasien yang dijalankan membuat kegiatan yang dijalankan menjadi tersusun, terstruktur dan terinci.
- e. Infrastruktur teknologi yang digunakan mendukung kegiatan operasi dalam hal penyimpanan data.

Penilaian Resiko *System* informasi akuntansi yang diterapkan Rumah Sakit Siloam Manado dapat mengatasi penilaian resiko yang mungkin terjadi dan merugikan. Informasi dan Komunikasi *System* informasi akuntansi Rumah Sakit Siloam Manado mampu menghasilkan informasi yang akurat, handal dan dapat dipercaya, yang akan membantu pihak manajemen dalam mengambil keputusan mengenai pengelolaan dan pengendalian kegiatan di Rumah Sakit Siloam Manado, melalui komunikasi berupa tindakan atau perintah secara lisan. Pengawasan Kepala keuangan melakukan pengawasan untuk

mencegah terjadinya kecurangan dan penyelewengan yang dapat merugikan Rumah Sakit Siloam Manado.

Erlangga (2018) Berdasarkan Penelitian erlangga mengenai Penerapan Manajemen Risiko kredit guna meminimalisir risiko kredit (Studi Pada PT.BPR Wlingi Pahalapakto) maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Manajemen Risiko kredit yang diterapkan di PT.BPR Wlingi Pahalapakto sudah baik sesuai teori, namun pengidentifikasian risiko kredit pada PT.BPR Wlingi Pahalapakto sedikit memiliki kelemahan jika nasabah yang akan mengajukan kredit memiliki tanggungan kredit di Koperasi, maka tidak dapat dilacak dalam Sistem Informasi Debitur dan perlu kejujuran serta komunikasi yang baik antara nasabah dengan *Account Officer*.
2. Penerapan manajemen risiko PT.BPR Wlingi Pahalapakto sudah sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu:
 - a. Pengawasan aktif Dewan komisaris dan Direksi
 - b. Kebijakan, Prosedur dan penetapan *Limit*
 - c. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan Sistem Informasi manajemen risiko kredit
 - d. Pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko kreditPT. BPR Wlingi Pahalapakto telah memenuhi keempat kriteria manajemen risiko yang ditetapkan OJK diatas dan penerapannya dirasa sudah cukup baik.
3. Cara dan upaya yang dilakukan PT.BPR Wlingi Pahalapakto dalam menangani kredit bermasalah ada 2 yaitu rescheduling dan restructuring, dengan menggunakan 2 metode tersebut beserta pendekatan kekeluargaan dalam menyelesaikan kredit bermasalah.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

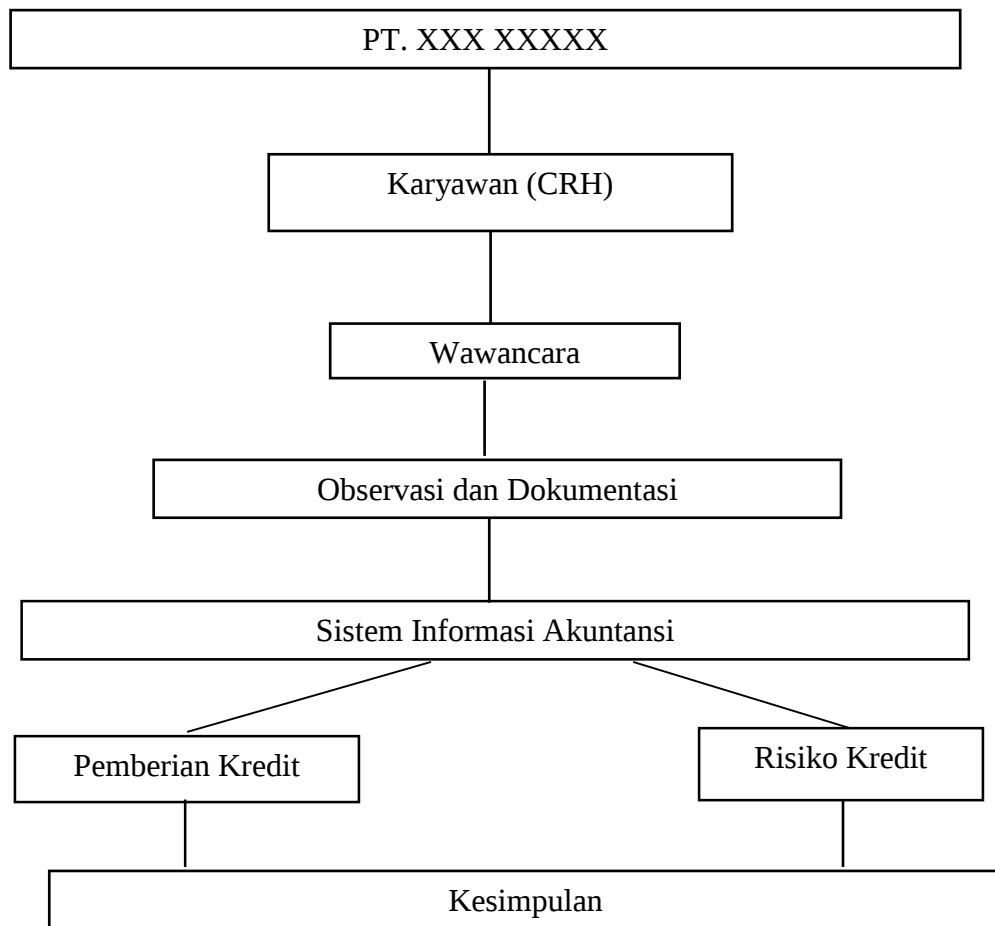
PENELITI	JUDUL	VARIABEL	HASIL
Rahman (2017)	Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Komponen Utama Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Perusahaan Pada PT Tiki Palembang	Sistem Informasi Akuntansi Kinerja Perusahaan	Sistem Informasi Akuntansi, dan komponen utama sistem informasi akuntansi signifikan memengaruhi kinerja perusahaan secara simultan. Sistem Informasi Akuntansi signifikan memengaruhi kinerja perusahaan secara parsial. Komponen Utama Sistem Informasi Akuntansi signifikan memengaruhi kinerja perusahaan secara parsial.
Permatasari (2019)	Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pada PT BPR Bank Jatim Kabupaten Ponorogo	Pemberian Kredit	1. Prosedur pemberian kredit di PT. BPR Bank Jatim Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan ketentuan prosedur yang dimiliki, walaupun dalam praktiknya masih terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan. 2. Hambatan-hambatan dalam prosedur pemberian kredit di PT. BPR Bank Jatim meliputi adanya faktor kedekatan calon nasabah dengan pegawai bank, persyaratan dalam pengajuan permohonan kredit yang tidak dilengkapi, dan informasi palsu yang diberikan oleh calon nasabah. 3. Cara mengatasi hambatan-hambatan di PT. BPR Bank Jatim adalah melakukan survei kembali atau survei lebih mendalam mengenai calon nasabah yang dekat dengan pegawai, untuk persyaratan yang tidak lengkap dalam permohonan kredit maka cara mengatasinya adalah penundaan permohonan kredit dari Customer Service (CS) sampai dengan persyaratan lengkap dan informasi palsu yang diberikan oleh nasabah cara mengatasinya yaitu melakukan kunjungan dengan tujuan informasi yang diberikan benar.
Sari (2017)	Prosedur pemberian kredit usaha mikro pada PT. BPR EKA BUMI ARTHA METRO	Prosedur pemberian kredit	tahap permohonan kredit, investigasi, on the spot, analisa kredit, pengajuan kepada komite kredit, pemberian keputusan kredit/pencairan kredit, tahap monitoring, dan tahapan terakhir adalah tahap pelunasan. Dalam penyaluran kredit usaha mikro PT. BPR Eka Bumi Artha menggunakan analisis 5C yaitu: character (watak), capacity (kemampuan), capital (modal), colleteral (jaminan), condition

Latega (2018)	Analisis Manajemen Resiko Kredit terhadap pemberian Kredit Usaha Kecil (KUK) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk Cabang Makassar Ahmad Yani	Manajemen Resiko Kredit dan Pemberian Kredit	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang ahmad yani Makassar di dalam menyalurkan kredit senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku terutama system dan prosedur serta prinsip – prinsip pemberian Kredit. 2. Berdasarkan hasil analisis maka hipotesis yang dikemukakan terbukti karena manajemen resiko berpengaruh terhadap penyaluran kredit usaha kecil (KUK) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang ahmad yani makassar, berdasarkan tingkat NPL yang rendah (resiko rendah) karena dibawah 5%. 3. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang ahmad yani Makassar sesuai dengan penyaluran kredit baik jumlah kredit maupun persentase juga mengalami peningkatan, karena fungsi utama bank tersebut menerima tabungan disamping menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan
Paulus (2016)	Fungsi Sistem Informasi Akuntansi Atas Pengendalian Internal Pendapatan (Studi Kasus pada Rumah Sakit Siloam Manado)	Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal	a. Sumber daya manusianya terdiri dari orang-orang yang kompeten dan berpengalaman serta menjalankan tugasnya dengan baik. b. Software yang digunakan untuk memproses data sangat mendukung kegiatan yang dijalankan dalam hal menginput dan mengolah data pasien yang berobat. c. Dokumen yang digunakan sebagai alat untuk menghasilkan informasi pendapatan. d. Prosedur penerimaan pasien yang dijalankan membuat kegiatan yang dijalankan menjadi tersusun, terstruktur dan terinci. e. Infrastruktur teknologi yang digunakan mendukung kegiatan operasi dalam hal penyimpanan data. Penilaian Resiko System informasi akuntansi yang diterapkan Rumah Sakit Siloam Manado dapat mengatasi penilaian resiko yang mungkin terjadi dan merugikan. Informasi dan Komunikasi System informasi akuntansi Rumah Sakit Siloam Manado mampu menghasilkan informasi yang akurat, handal dan dapat dipercaya, yang akan membantu pihak manajemen dalam mengambil keputusan

			mengenai penelolaan dan pengendalian kegiatan di Rumah Sakit Siloam Manado, melalui komunikasi berupa tindakan atau perintah secara lisan. Pengawasan Kepala keuangan melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya kecurangan dan penyelewengan yang dapat merugikan Rumah Sakit Siloam Manado.
Erlangga (2018)	Evaluasi Penerapan Manajemen Resiko pada Pengelolaan Kredit Guna Meminimalisir Risiko Kredit	Manajemen Resiko dan Pengelolaan Kredit	Manajemen Risiko kredit yang diterapkan di PT.BPR Wlingi Pahalapakto sudah baik sesuai teori, namun pengidentifikasian risiko kredit pada PT.BPR Wlingi Pahalapakto sedikit memiliki kelemahan jika nasabah yang akan mengajukan kredit memiliki tanggungan kredit di Koperasi, maka tidak dapat dilacak dalam Sistem Informasi Debitur dan perlu kejujuran serta komunikasi yang baik antara nasabah dengan Account Officer. 2. Penerapan manajemen risiko PT.BPR Wlingi Pahalapakto sudah sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu: - Pengawasan aktif Dewan komisaris dan Direksi - Kebijakan, Prosedur dan penetapan Limit - Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan Sistem Informasi manajemen risiko kredit - Pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko kredit PT. BPR Wlingi Pahalapakto telah memenuhi keempat kriteria manajemen risiko yang ditetapkan OJK diatas dan penerapannya dirasa sudah cukup baik. 3. Cara dan upaya yang dilakukan PT.BPR Wlingi Pahalapakto dalam menangani kredit bermasalah ada 2 yaitu rescheduling dan restructuring, dengan menggunakan 2 metode tersebut beserta pendekatan kekeluargaan dalam menyelesaikan kredit bermasalah.

Sumber: Penelitian Terkait (2022)

2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2.3. Kerangka Konseptual Penelitian

Sumber : Penelitian Terkait (2022)